



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Elvitrasyah  
Jabatan : Direktur Penanganan Pelanggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Direktur Penanganan Pelanggaran

Teuku Elvitrasyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya penyadartahuan yang efektif bagi nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	1	Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal (Nilai)	74
SK2	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	2	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		3	Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (Indeks)	80
		4	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		5	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80
SK3	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	6	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
		7	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70
		8	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain (Indeks)	70
		9	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (%)	100
		10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100
		11	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Penanganan Pelanggaran (Nilai)	78
		12	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Inovasi)	1
SK4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya penyadartahuan yang efektif bagi nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	1	Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal (Nilai)	74
SK2	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	2	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		3	Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (Indeks)	80
		4	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		5	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	80
SK3	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	6	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
		7	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70
		8	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain (Indeks)	70
		9	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (%)	100
		10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100
		11	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Penanganan Pelanggaran (Nilai)	78
		12	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Inovasi)	1
SK4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	75
		15 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Indeks)	82
		16 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	84
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		19 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	94
		20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	80
		21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	80
		22 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	99,4



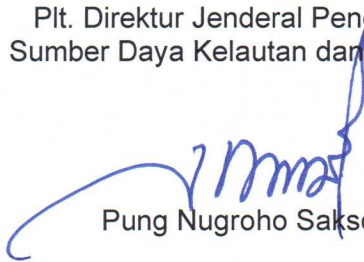
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	75
		15 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Indeks)	82
		16 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	84
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		19 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	94
		20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	80
		21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	80
		22 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	99,4

**Data Anggaran**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	10.853.500.000
<b>Total Anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2024</b>		<b>10.853.500.000</b>


Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Direktur Penanganan Pelanggaran



Teuku Elvitrasyah